

Urgensi Wawasan Sejarah dan Kebangsaan pada Negara-Bangsa Plural: Refleksi Historis atas Persoalan Integrasi dan Disintegrasi di Indonesia pada Abad XXI

Singih Tri Sulistiyono* dan Yety Rochwulaningsih

*Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro
Jl. dr. Antonius Suroyo Tembalang, Semarang - Indonesia

*Alamat korespondensi: singgitrisulistiyono@live.undip.ac.id
DOI: 10.14710/jscl.v8i2.60316

Diterima/Received: 6 Desember 2023; Direvisi/Revised: 20 Februari 2024; Disetujui/Accepted: 8 Maret 2024

Abstract

This article emphasizes the significance of Indonesian national consciousness as a means to uphold national integrity and unity within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). Through this study, it was observed that Indonesia faces an inherent 'flaw' from its inception, particularly in maintaining national integration. This study is grounded in a historical perspective, tracing the concept of national consciousness and its application in mitigating the threat of national disunity. The challenge in maintaining national integration stems from the fact that Indonesia was established not on the basis of uniformity, but rather due to the rich diversity in race, ethnicity, religion, and social status. The only common ground lies in shared aspirations, namely liberation from colonialism and the establishment of an independent, prosperous, just, and self-respecting nation. To address these inherent challenges, the spirit of nationalism must be continually cultivated and reinforced to safeguard Indonesia's national unity in the face of potential disintegration.

Keywords: National Consciousness; Plural Nation-State; National Integration; National Disintegration.

Abstrak

Artikel ini merekomendasikan pentingnya wawasan kebangsaan Indonesia sebagai upaya untuk menjaga keutuhan dan integrasi nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melalui kajian ini, ditemukan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki 'cacat' bawaan sejak lahir, yaitu kerapuhan dalam mempertahankan integrasi nasional. Kajian ini disusun berdasar pada perspektif historis dalam merunut konsep wawasan kebangsaan dan implementasinya untuk menanggulangi ancaman disintegrasi bangsa. Kerapuhan dalam mempertahankan integrasi nasional terkait dengan kenyataan bahwa negara Indonesia lahir bukan karena persamaan tetapi justru karena perbedaan dan keragaman baik dalam ras, kelompok etnik, agama, maupun status sosial. Kesamaan mungkin hanya ditemukan dalam wujud cita-cita, yaitu lepas dari kolonialisme bangsa asing dan membentuk negara yang merdeka, makmur, adil, dan memiliki harga diri. Untuk mengatasi cacat bawaan sejak lahir itulah maka semangat kebangsaan perlu selalu diproduksi dan reproduksi guna mengawal integrasi nasional Indonesia agar mampu menghadapi tantangan disintegrasi nasional.

Kata kunci: Wawasan Kebangsaan; Negara-bangsa Plural; Integrasi Nasional; Disintegrasi Nasional.

Pendahuluan

Bagi Indonesia, konflik internasional dan dampak-dampak negatif yang ditimbulkannya sudah dirasakan semenjak berabad-abad yang lalu ketika kepulauan Indonesia menjadi 'contesting ground' di antara negara-negara kapitalis dan imperialis. Bangsa-bangsa Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan sebagainya saling bertempur untuk

merebutkan kepulauan Indonesia. Tidak dapat dihindarkan, bahwa akhirnya konflik-konflik tersebut menyeret masyarakat Indonesia ke dalam konflik-konflik yang berdimensi internasional.

Dalam dinamikanya, konflik-konflik internasional tersebut bukan hanya merupakan *clash* langsung di antara kekuatan-kekuatan kapitalisme dan imperialisisme Barat, tetapi juga di antara kekuatan lokal yang didalangi oleh

kekuatan-kekuatan asing. Dalam hal ini, bukan hanya kekuatan asing yang memanfaatkan kekuatan-kekuatan lokal untuk saling bertempur demi kepentingannya-dalam konsep modern disebut sebagai proxy war-melainkan juga kadangkadang kekuatan lokal memanfaatkan kekuatan asing untuk memenangkan konflik lokal mereka. Demikian pula konflik yang terjadi antara kekuatan lokal melawan kekuatan asing. Namun demikian, apapun prosesnya, titik akhirnya adalah bahwa kepulauan Indonesia dijajah oleh Belanda hingga 1942 (Ricklefs 1981, 138; Henley 1996, 5).

Setelah memasuki abad XX, Indonesia menghadapi babak baru dalam konflik internasional. Hal itu terkait dengan mulai masuknya berbagai paham dan ideologi politik dunia, yaitu nasionalisme, sosialisme-komunisme, kapitalisme-liberalisme, dan Pan-Islamisme. Pada masa-masa itu sekali lagi Indonesia mengalami perubahan peta konflik, baik antara masyarakat Indonesia sebagai masyarakat terjajah dengan kekuatan kolonial Belanda, maupun di antara elemen-elemen masyarakat Indonesia sendiri. Dalam hal ini berbagai konflik dapat terjadi, baik konflik langsung maupun tidak langsung sebagaimana yang terjadi saat ini. Indonesia masih mengalami dampak krisis yang telah mengantarkan bangsa Indonesia menuju ke arah keterpurukan ekonomi. Hal itu dapat dilihat dari hutang negara dan sektor swasta yang menumpuk, persoalan inflasi, dan angka kemiskinan di dalam masyarakat yang semakin meningkat (Handelman 2003, 279).

Jika pada masa kolonialisme Belanda, paham nasionalisme telah mampu mengatasi konflik internal di kalangan bangsa Indonesia dan selanjutnya nasionalisme menjadi kekuatan penggerak utama dalam melawan penjajah, maka pada saat inipun ketika bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai persoalan kebangsaan baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun persoalan yang timbul sebagai dampak konflik internasional seperti radikalisme dan terorisme, banyak orang berharap rasa nasionalisme dapat mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Namun demikian, pada kenyataannya hal itu tidak mudah dilakukan. Persoalan-persoalan tersebut masih belum sepenuhnya dapat diatasi. Dalam kaitan itu, artikel ini ingin merekomendasikan pentingnya

wawasan kebangsaan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI.

Kajian ini merupakan refleksi atas situasi nasionalisme Indonesia pada masa kini dengan menggunakan pendekatan historis yang berdasar pada pendapat para sejarawan yang dimuat pada buku dan jurnal. Kajian reflektif ini secara akademik dapat dipertanggungjawabkan, mengingat persoalan kekinian dieksplorasikan melalui permasalahan historis, baik secara global (tidak hanya Eropa), dan berupaya membawa persoalan itu ke dalam dialog historis (Prior dan Lunsford 2007). Dalam sejarah, dokumen-dokumen, baik itu primer maupun sekunder, digunakan untuk membangun interpretasi atas isu yang mengharuskan untuk memahami latar belakang penyusunan sumber, membaca, dan menafsirkan sumber-sumber sejarah, dan mensintesis wacana (Young dan Leinhardt 1998).

Ajang Perbenturan Ideologi

Jika pada abad-abad sebelumnya kepulauan Indonesia menjadi ajang pertempuran antara kelompok-kelompok kepentingan dan antara kekuatan-kekuatan kapitalisme, maka utamanya memasuki abad XX Indonesia berubah menjadi ajang konflik-konflik ideologi antara kolonialisme (sebagai 'anak kandung' liberalisme, kapitalisme, dan imperialisme), sosialisme-komunisme ('anak haram' kapitalisme), nasionalisme ('anak durhaka' monarkhisme) dan Pan-Islamisme yang muncul sebagai bentuk resistensi terhadap kolonialisme Barat.

Pada waktu itu dapat dikatakan bahwa hampir semua elemen bangsa Indonesia melakukan perlawanan terhadap penindasan oleh kolonial Belanda sebagai kekuatan lama (*old-established power*) yang merefleksikan kepentingan kapitalisme yang mengkooptasi negara (MacIntyre 1994, 2-4). Di tengah semakin menguatnya negara kolonial Hindia-Belanda, muncullah kekuatan baru anti-kolonialisme yang awalnya juga lahir di Eropa, yaitu sosialisme-komunisme. Paham ini menentang kapitalisme dan kolonialisme sebagai bentuk eksploitasi dan penindasan manusia terhadap manusia. Mereka berjuang untuk mengganti kapitalisme dan kolonialisme yang eksploitatif dengan suatu

tatanan masyarakat baru dengan dasar sosialisme yang berkeadilan. Ideologi ini termanifestasi dalam organisasi yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan Belanda seperti (Indische Sociaal Democratische Vereeniging) ISDV, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan berbagai organisasi kiri yang lain. Hal yang sangat menarik adalah bahwa kekuatan kolonialisme Barat yang sebelumnya saling bersaing dan berkonflik, ketika mereka sama-sama menghadapi gerakan sosialisme-komunisme dapat bersatu untuk melawan ideologi internasional yang memiliki sifat radikal (Hering 2000, 145).

Awal abad XX juga ditandai dengan merebaknya gerakan Pan-Islamisme yang pada awalnya muncul di dunia Timur Tengah. Gerakan solidaritas dan kebangkitan Islam ini memiliki sikap anti-kolonialisme Barat. Mereka memandang penjajahan Barat sebagai penjajahan terhadap orang-orang Islam. Baik langsung maupun tidak, Pan-Islamisme telah mendorong kemunculan berbagai resistensi terhadap kolonialisme Belanda yang berupa berbagai bentuk perlawanan/pemberontakan anti-kolonial, dipimpin oleh para ulama. Semangat Pan-Islamisme juga diwujudkan dalam bentuk perjuangan dengan menggunakan organisasi modern seperti Syarikat Islam (SI), Muhammadiyah, dan sebagainya (Noer 1982, 115).

Kebangkitan dan perlawanan Islam (baik dengan cara konvensional maupun dengan organisasi modern) inilah yang memunculkan sikap *Islamophobia* pemerintah kolonial Belanda. Banyak perlawanan ditindas dengan kekerasan senjata. Mereka juga memecah belah organisasi Islam, sehingga Islam tidak lagi menjadi kekuatan yang perlu ditakuti oleh Belanda.

Oleh karena memiliki sikap yang kurang lebih sama, yaitu anti penjajahan sesama manusia terhadap manusia lain atau satu bangsa terhadap bangsa lain, maka tidak mengherankan jika pada waktu itu dijalin hubungan kerja sama antara gerakan Pan-Islamisme dengan gerakan sosialisme, sebagaimana yang terlihat dalam gerakan SI sebelum akhirnya pecah menjadi dua, yaitu SI Putih dan SI Merah. Perpecahan ini jelas sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah kolonial Belanda, sebab kolaborasi antara sosialisme dan Pan-Islamisme akan menjadi kekuatan besar yang

kemungkinan dapat menggulingkan rezim kolonial Belanda di Indonesia. Landasan ideologis antara Islam dan sosialisme pernah dirumuskan dengan brilian oleh pemimpin SI yang kharismatik, yaitu H.O.S. Tjokroaminoto (Tjokroaminoto 1963). Tidak menutup kemungkinan bahwa kehancuran SI tidak luput dari kemungkinan usaha pemerintah kolonial Belanda yang lihai menerapkan manajemen konflik yang disebut '*divide et impera*'. Namun sayangnya, pihak yang dipecah-belah justru merasa 'sangat menikmati' perilakunya yang saling menghancurkan. Tradisi semacam ini mungkin masih berlangsung hingga kini meskipun berubah bentuk dan modusnya.

Situasi Nasionalisme Indonesia Abad XX

Sejak penghujung akhir abad XX hingga penghujung awal abad XXI, nasionalisme Indonesia menghadapi tantangan yang berat. Di satu sisi, proses globalisasi dan ekspansi pasar bebas seolah-olah telah membuat negara-bangsa tidak berdaya. Kekuasaan negara semakin berkurang. Banyak wewenang negara yang jatuh ke tangan pasar. Negara hanya difungsikan sebagai wasit. Lebih parah lagi, di Indonesia, negara tidak hanya sekadar wasit belaka, tetapi wasit yang telah terkooptasi oleh kekuatan pasar, sehingga tidak netral, dan cenderung berpihak kepada penguasa pasar serta uang. Jika boleh dikatakan, kedaulatan tidak berada di tangan rakyat lagi, melainkan uanglah yang berdaulat.

Gerakan nasionalisme memiliki andil yang sangat signifikan dalam merangsang dinamika masyarakat Indonesia sejak awal abad XX. Meskipun pada awalnya gerakan nasionalisme yang lahir di Eropa ditujukan untuk menentang monarki absolut, namun ketika merasuk ke Indonesia, ideologi itu digunakan untuk melawan kolonialisme dalam rangka mencapai kemerdekaan dan membangun bangsa baru, yaitu Indonesia. Nasionalisme Indonesia waktu itu merupakan ideologi yang lebih generik yang mampu mewadahi substansi-substansi dari ideologi lain, mulai dari kapitalisme, sosialisme, hingga islamisme. Oleh karena itu, pada akhirnya nasionalismelah yang berhasil mengambil alih kendali NKRI setelah Belanda dan kemudian Jepang hengkang dari Indonesia.

Salah satu pertanyaan yang menarik adalah apakah nasionalisme awal abad XX dapat menyelesaikan masalah-masalah kebangsaan waktu itu? Jika dikaji secara historis, pada masa-masa awal pertumbuhannya, nasionalisme Indonesia sudah terbukti memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pemecahan masalah kebangsaan, terutama dalam proses penguatan rasa keindonesiaan sebagai sebuah bangsa baru, dan dalam rangka mengusir penjajah. Seperti diketahui bahwa periode munculnya pergerakan nasional bersamaan dengan puncak perkembangan masyarakat kolonial yang merupakan produk dari kolonialisme Belanda di Indonesia. Dalam masyarakat kolonial, posisi dan peranan masyarakat Indonesia dipinggirkan oleh kaum kolonialis. Dengan berbagai cara, kaum kolonialis telah menguasai kehidupan masyarakat Indonesia dengan cara: intimidasi, adu-domba, invasi, dan aneksasi. Kekuatan kolonial bahkan telah berusaha melanggengkan perampasan itu dengan menciptakan tata hukum yang mereka buat, sehingga seolah-olah kehadiran mereka memiliki dasar legalitas. Dengan cara begitu, mereka mencoba untuk menciptakan masyarakat kolonial dengan semangat *apartheid*. Basis rasial digunakan untuk menciptakan hukum-hukum kolonial.

Dalam Pasal 109 Peraturan Pemerintah (*Regeering Reglement*) Tahun 1854 misalnya, ditetapkan adanya pembedaan golongan masyarakat, yang teridir atas golongan Eropa dan orang-orang yang dipersamakan dengan Eropa di satu pihak, dan Pribumi di pihak lain. Pada awalnya, kategori Pribumi juga mencakup orang-orang pendatang dari Asia seperti orang Cina, India, Arab, dan sebagainya. Namun kemudian, mereka dipisahkan menjadi kelompok sendiri dengan sebutan golongan Timur Asing yang menduduki kelas ke dua setelah golongan Eropa. Kriteria etnik dan ras dijadikan dasar dari struktur hukum masyarakat kolonial (Houben 2002, 61). Oleh sebab itu, pada waktu itu masyarakat Indonesia memang sedang menghadapi ketidakadilan struktural yang sengaja diciptakan oleh penguasa kolonial yang menempatkan rakyat pribumi pada posisi paling hina dalam struktur masyarakat kolonial. Secara kultural, kebijakan semacam ini telah menjadikan rakyat pribumi

mengidap *minderwaardigheidscomplex*, semacam sindrom rendah diri yang kronis.

Dalam masyarakat kolonial, posisi rakyat dan negara cenderung berhadap-hadapan secara frontal. Dengan demikian, situasi konflik terus berkembang menjadi sesuatu yang laten dalam hubungan antara negara dan rakyat. Pada periode akhir kolonial disaksikan bahwa kekuatan kolonial berusaha memperkuat posisi negara kolonial dan dengan demikian posisi rakyat terjajah menjadi diperlemah. Seperti diketahui bahwa proses penguatan negara kolonial dimulai sejak awal abad XIX ketika terjadi proses birokratisasi negara kolonial, di mana baik birokrasi Eropa (*Binenlandsbestuur*) maupun pribumi (*Inlandsbestuur*) telah menjadi mesin pelaksana dari kebijakan pemerintah pusat di Batavia (Gubernur Jenderal) serta Menteri Urusan Jajahan di negeri Belanda.

Semakin menguatnya negara kolonial juga dapat dilihat dari jumlah birokrat yang semakin bertambah. Meskipun jumlah pejabat tinggi tidak menunjukkan peningkatan yang menyolok antara 1825 hingga 1890, namun peningkatan itu terjadi pada level pejabat perantara (yaitu tingkat asisten residen dan controlleur), dari 73 pada 1825 menjadi 190 pada 1890. Mereka memiliki posisi yang sangat sentral dalam birokrasi kolonial. Pejabat-pejabat inilah yang secara langsung melakukan hubungan dengan birokrasi pribumi (bupati dan struktur di bawahnya). Merekalah yang biasanya melakukan penekanan-penekanan terhadap para pejabat pribumi untuk melaksanakan kebijakan kolonial. Kekuatan negara kolonial pada waktu itu juga disokong oleh keberadaan tentara kolonial yang tangguh yang disebut Koninklijke Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Pada 1820, jumlah anggota KNIL sekitar 10.000 personal. Setelah Perang Diponegoro, jumlah tersebut naik dua kali lipat. Pada 1875, jumlah anggota KNIL menjadi 30.000. KNIL telah menjadi pengawal yang ampuh bagi berjalannya birokrasi kolonial (Houben 2002, 60).

Menguatnya negara kolonial berjalan seiring dengan ekspansi ekonomi yang dilakukan oleh Belanda yang bahkan dapat dikatakan bahwa penguatan negara kolonial itu sendiri diupayakan dalam rangka ekspansi ekonomi. Jika di Eropa terjadi perkembangan di mana negara memberikan

kebebasan kepada rakyat/ swasta, maka sebaliknya di negeri koloni, pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang intervensionis baik dalam bidang politik maupun ekonomi. Dalam hubungan ini, Jawa misalnya, ditempatkan dalam posisi sebagai daerah penghasil keuntungan (*wingewest*) bagi negeri induk. Fungsi negeri jajahan hanya sebagai sapi perah belaka, atau sebagai gabus yang membuat negeri Belanda terapung di atas laut.

Uraian tersebut memberikan gambaran yang jelas bahwa rakyat terjajah telah menghadapi penderitaan multidimensi: terhina secara kultural, terbelenggu secara politik, dan tereksplotasi secara ekonomi. Kemunculan Politik Etis pada awal abad XX yang secara retorika hendak ditujukan untuk 'membalas budi' kepada rakyat jajahan dan menyejahterakannya, barangkali sebenarnya merupakan alat bagi negara kolonial untuk meneguhkan kembali kekuasaannya atas rakyat yang selama bagian ke dua abad XIX banyak dituntun oleh kaum pemodal swasta. Dalam kerangka Politik Etis, negaralah yang menentukan konsep kesejahteraan secara ekonomi dan penerapan konsep kesejahteraan secara politik dengan membangun persepsi politik-rakyat sebagai *kawulo* dan pemerintah sebagai gusti-yang berwenang menjadi *pangreh praja*. Dalam konteks ini, hanya *pangreh praja* yang berwenang memerintah negara. Dengandemikian, meskipun Politik Etis secara ekonomi barangkali meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun secara politis, posisi rakyat menjadi semakin lemah. Apalagi, retorika Etis itu secara menggelikan diiringi dengan ekspansi dan penaklukan yang brutal terhadap daerah-daerah di Luar Jawa, seperti Lombok, Bone, Aceh, Seram, dan sebagainya (Lindblad 2002, 21; Lindblad 1989, 1-6).

Pergerakan nasional yang didasari semangat nasionalisme pada waktu itu bukan merupakan satu-satunya bentuk perlawanan terhadap kolonialisme di Indonesia. Antesenden kolonial itu sendiri sudah merupakan bagian dari tradisi resistensi dalam sejarah Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari perjuangan rakyat melawan kolonialisme, baik sebelum maupun sesudah abad XX. Selama abad XIX, banyak terjadi perlawanan rakyat terhadap penjajahan Belanda baik dalam skala besar seperti Perang Pattimura, Perang Diponegoro, Perang Padri, Perang Aceh, dan

sebagainya, maupun dalam skala kecil untuk membebaskan belenggu penjajahan, menghapuskan perlakuan yang diskriminatif dan perampasan kemakmuran yang dilakukan oleh penguasa kolonial (Kartodirdjo 1978). Perlu ditekankan di sini bahwa perasaan nasionalisme Indonesia yang menjadi pendorong munculnya gerakan nasional baru terjadi pada abad XX. Nasionalisme muncul sebagai bagian dari proses berlangsungnya wacana intelektual sebagai konsekuensi logis dari perkembangan pendidikan modern sejak akhir abad XIX. Setidaknya ada beberapa ciri yang menonjol dari munculnya pergerakan nasional di Indonesia.

Pertama, adanya perasaan anti-kolonial dan kadang-kadang *xenophobia* yang berlebihan. Sifat itulah yang bahkan mungkin mendorong percepatan formasi rasa kebangsaan. *Kedua*, bahwa peranan para perantau sangat besar dalam memupuk kesadaran kebangsaan. Mula-mula nasionalisme yang muncul di Hindia Belanda adalah nasionalisme perantauan, ketika orang-orang dari Ambon, Minahasa, Sumatra, Jawa, dan sebagainya saling bertemu dan melakukan interaksi.

Ketiga, bahwa sifat kekotaan sangat menonjol dalam proses formasi bangsa. Hal itu berhubungan dengan kenyataan bahwa interaksi sosial antaretnik dan kelompok sosial yang berbeda banyak terjadi di kota-kota besar yang sejak masa prakolonial sudah menjadi pusat pertemuan berbagai etnik dan kelompok sosial untuk melakukan bisnis. Dari sisi itu kota-kota telah berfungsi sebagai '*melting pot*' bagi berbagai elemen sosial yang memungkinkan mereka saling mengenal, berinteraksi, dan membuat kesepakatan-kesepakatan untuk membina suatu kehidupan sebagai komunitas bangsa. Maka dari itu, tampaknya penjajahan asing dan kesadaran sebagai rakyat yang terjajah telah mendorong suatu kebangkitan nasional. Dengan kata lain, kolonialisme di negeri jajahan telah melahirkan nasionalisme. Nasionalismelah yang pada gilirannya berhasil mengusir kolonialisme asing. Oleh sebab itu, pada waktu itu nasionalisme dapat digunakan sebagai media untuk mengatasi persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia dalam rangka mengusir panjajah menuju kemerdekaan. Sudah barang tentu semestinya

semangat nasionalisme juga dapat digunakan untuk mengisri kemerdekaan.

Jika perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan adalah mengusir penjajah untuk mencapai kemerdekaan nasional, maka perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya setelah mencapai kemerdekaan adalah mewujudkan persatuan, kedaulatan, dan keadilan serta kemakmuran sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu: "...negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur". Jika pada masa penjajahan nasionalisme Indonesia dapat menjadi daya penggerak dan sumber inspirasi sehingga bangsa Indonesia mampu mencapai kemerdekaan dan mengusir penjajah asing, maka pertanyaannya adalah mengapa nasionalisme Indonesia setelah kemerdekaan semakin '*membre*' dan tidak mampu lagi mempertahankan 'kemerdekaan' dan kedaulatan dari berbagai bentuk 'penjajahan baru'. Mengapa nasionalisme Indonesia terseok-seok dalam menghadapi ancaman disintegrasi, dan terhuyung-huyung dalam mencapai cita-cita nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur? Mengapa nasionalisme Indonesia saat ini tidak mampu lagi menjadi kekuatan dan pendorong untuk mencapai tujuan nasional? Jika memang hal itu terjadi, maka perlu revitalisasi terhadap nasionalisme Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah dengan cara apa revitalisasi nasionalisme Indonesia itu dilakukan? Dalam hubungan itulah mungkin perlu adanya gerakan Nasionalisme Gelombang II bagi Indonesia pada milenium ketiga ini.

Bagaimana dengan Nasionalisme Abad XXI?

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bagaimana nasionalisme memiliki andil yang signifikan dalam memecahkan persoalan komunitas bangsa pada tahap awal perjalanan sejarah Indonesia modern. Jika perjuangan bangsa Indonesia pada masa penjajahan adalah mengusir penjajah untuk mencapai kemerdekaan nasional, maka perjuangan bangsa Indonesia selanjutnya setelah mencapai kemerdekaan adalah mewujudkan persatuan, kedaulatan, dan keadilan serta kemakmuran. Jika pada masa penjajahan nasionalisme Indonesia dapat menjadi daya

penggerak dan sumber inspirasi sehingga bangsa Indonesia mampu mencapai kemerdekaan dan mengusir penjajah asing, maka pertanyaannya adalah mengapa nasionalisme Indonesia menjadi '*membre*' atau '*letoy*' dan tidak mampu lagi mempertahankan 'kemerdekaan' dan kedaulatan dari berbagai bentuk 'penjajahan baru'.

Ada beberapa titik penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang perlu direvitalisasi dalam rangka untuk memfungsikan nasionalisme sebagai tenaga penggerak dan sumber inspirasi dalam mencapai tujuan bersama sebagai bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur dan sekaligus untuk mengatasi berbagai persoalan yang membelit bangsa Indonesia. Titik-titik penting itu antara lain: kesadaran terjajah, kemandirian, eorientasi dari *ethno-nation* ke *nation-State*, membuat persamaan nasib, dan pendekatan sosial-budaya.

Kesadaran Terjajah

Kembali kepada pertanyaan mendasar: mengapa Kebangkitan Nasional I berhasil mengantarkan proses formasi bangsa Indonesia yang berpuncak pada Proklamasi 17 Agustus 1945, sedangkan Kebangkitan Nasional II tidak banyak mendapat sambutan untuk mencapai tujuan proklamasi, yaitu masyarakat adil makmur? Salah satu jawabannya adalah bahwa organisasi-organisasi pergerakan nasional pada waktu itu betul-betul aktual sesuai dengan kondisi masyarakatnya dan mampu mengartikulasikan serta merealisasikan cita-cita masyarakatnya.

Kondisi aktual masyarakat Indonesia sebagai masyarakat terjajah pada waktu itu adalah masyarakat yang terbelenggu secara politik, tereksplotasi secara ekonomi, dan terhina secara kultural. Persoalan yang sangat mendasar sesungguhnya terletak pada kenyataan bahwa kebanyakan masyarakat menerima itu sebagai nasib (suratan takdir) yang sudah digariskan oleh Tuhan. Ketidaksadaran itu menjadi masalah yang mendasar dan oleh karena itu menjadi tugas utama bagi organisasi-organisasi pergerakan nasional untuk membangkitkan kesadaran kebanyakan rakyat. Hal itu telah dengan sangat baik diformulasikan oleh Sukarno dengan memompa kesadaran bahwa pada masa dahulu bangsa Indonesia pernah jaya, sekarang sebagai bangsa

terjajah yang hina, dan masa depan yang gemilang akan dapat dicapai dengan cara harus berjuang melawan kolonialisme. Perlawanan harus dibangkitkan antara pihak 'sini' (Indonesia) dan pihak 'sana' (Belanda) (Hering 2000, 145).

Dengan demikian kecerdikan untuk merumuskan persoalan-persoalan aktual, ketajaman mengartikulasikan keinginan rakyat, dan kemampuan serta keberanian untuk merealisasikan cita-cita itu merupakan kunci keberhasilan pergerakan nasional. Demikian juga yang tidak kalah penting adalah membangkitkan kesadaran masyarakat bahwa mereka dalam keadaan hina sebagai masyarakat terjajah. Hanya kesadaran sebagai masyarakat terjajah yang akan memberikan semangat untuk merdeka. Di samping itu, salah satu sikap dasar yang dimiliki oleh tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi pergerakan nasional pada waktu itu adalah sikap mandiri dalam memperjuangkan dan merealisasikan cita-cita. Artinya, sejak periode awal mereka sudah menyadari bahwa kemerdekaan sebagai bangsa merupakan sesuatu yang tidak akan datang dari 'sana' tetapi harus direbut oleh 'sini'.

Bagaimana dengan Kebangkitan Nasional II sekarang ini dan di masa yang akan datang? Cukupkah beralasan jika dikatakan bahwa Kebangkitan Nasional II sekarang ini tidak ada gayung bersambut karena persoalan struktural yang dihadapi oleh bangsa Indonesia berbeda? Yaitu sebagai rakyat terjajah pada masa Kebangkitan Nasional I dan rakyat merdeka pada Kebangkitan Nasional II sekarang ini? Apakah sekarang ini masih diperlukan sebuah kebangkitan nasional? Untuk apa kebangkitan nasional itu? Bukankah sekarang ini bangsa Indonesia sudah merdeka?

Kebangkitan Nasional II, atau apapun namanya, tidak akan dapat mencapai hasil yang melampaui tahapan masyarakat merdeka dalam arti sesungguhnya. Masyarakat adil dan makmur yang dicita-citakan tidak akan tercapai tanpa melalui kemerdekaan. Kemerdekaan itu sendiri sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 hanya sebagai pintu gerbang, jembatan emas untuk mengawali sebuah perjuangan mencapai masyarakat adil dan makmur.

Melihat kegagalan demi kegagalan yang dialami oleh bangsa Indonesia selama ini, sikap

skeptis perlu diajukan: sudahkan rakyat Indonesia betul-betul merdeka? Sebagai 'sebuah bangsa', memang Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945, tetapi pertanyaannya adalah apakah sudah betul-betul merdeka? Apakah Indonesia sebagai bangsa ini masih dijajah dengan cara yang lain, misalnya penjajahan ekonomi (dengan dampak: hutang yang menggunggung dan penyedotan kekayaan yang tidak terelakkan), penjajahan politik dengan kurangnya independensi pemerintah dalam memutuskan kebijakan politik yang berskala luas. Bahkan sepertinya rakyat juga belum mengenyam kemerdekaan yang sesungguhnya karena hampir selalu berhadapan dengan penguasa yang tidak mampu memberikan kemerdekaan rakyat dalam arti yang luas. Apa yang paling celaka adalah: masih terjajah tetapi sudah merasa merdeka atau menerima penjajahan itu sebagai sebuah nasib. Jika hal itu terjadi maka semangat untuk berjuang merebut kemerdekaan tidak akan bangkit, sebab sudah merasa merdeka, makmur, adil, kaya, dan sebagainya. Dengan demikian, kunci untuk membangkitkan rakyat guna menggerakkan semangat kebangkitan nasional adalah dengan melakukan penyadaran bahwa bangsa ini masih dalam kondisi terjajah sehingga harus berjuang untuk memerdekakan diri dari kemiskinan, kebodohan, eksploitasi, ketidakadilan, dan sebagainya. Selain itu perlu ada penyadaran bahwa bangsa ini berada dalam bahaya besar baik dari segi ekonomi, politik, ideologi, maupun kebudayaan. Jika tidak segera diambil cara-cara yang mendasar maka tidak mustahil jika kebangkitan nasional yang kita harapkan justru akan membuahkan kebangkrutan nasional. Penyadaran itu dapat dilakukan oleh siapa saja (sekolah, partai politik, lembaga pemerintah, dan sebagainya) dan melalui media apa saja. Dalam hal ini, peranan pembelajaran sejarah di sekolah menjadi sangat penting dan dapat difungsikan sebagai pembebas cara berpikir generasi muda dalam menyikapi persoalan bangsa pada masa kini dan masa yang akan datang.

Kemandirian

Salah satu kunci sukses dari Kebangkitan Nasional I adalah kemandirian organisasi-organisasi pergerakan nasional dan para tokohnya sehingga

mereka mampu mengembangkan pemikiran dan aksi yang sesuai dengan cita-cita mereka masing-masing dalam rangka memperbaiki kehidupan masyarakat. Keadaan telah memaksa sebagian besar mereka untuk bertahan dan berkembang secara mandiri. Hampir tidak mungkin bagi mereka untuk 'minta bantuan' kepada pemerintah kolonial Belanda yang akan didobraknya, kecuali jika mereka ingin menjadi 'antek kolonial'. Dengan berbagai cara organisasi-organisasi pergerakan nasional itu menghimpun segala macam sumberdaya yang ada untuk melakukan aksi-aksinya. Memang di antara mereka ada yang bekerja sama dengan pemerintah kolonial, namun hal itu sering kali merupakan suatu strategi agar tidak terjadi konfrontasi dengan pemerintah kolonial. Tujuan mereka tetap berorientasi kepada kepentingan berbagai elemen masyarakat pribumi. Dengan demikian, berbagai organisasi pergerakan nasional pada waktu itu relatif mandiri dan tidak bergantung atau relatif bebas dari intervensi pemerintah kolonial yang akan dilawannya.

Sudah barang tentu pada saat ini pemerintah Republik Indonesia bukan merupakan musuh yang harus dilikuidasi. Dalam hal ini harus dibangun sinergi antara kepentingan rakyat dengan pemerintah. Kemandirian harus dibangun baik pada level individual, organisasi kemasyarakatan, maupun pemerintah, sehingga Indonesia tidak banyak bergantung kepada hutang luar negeri. Pengalaman telah memberikan pelajaran bahwa berawal dari hutang inilah kemerdekaan ekonomi, politik, dan kebudayaan akan terampas. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekuatan neoliberalisme akan melanggengkan penjajahan mereka melalui belitan hutang dan pelanggaran ketergantungan kekuatan kapitalisme. Dengan demikian, kemandirian yang harus dibangun dalam kerangka Kebangkitan Nasional II ini adalah melepaskan diri dari jeratan hutang dan ketergantungan kepada pihak asing. Apa yang harus segera dilakukan adalah melaksanakan 'revolusi kemandirian'.

Tentu saja hal itu tidak dilakukan dengan cara 'ngemplang' tetapi dengan cara pengembangan ekonomi yang berbasis pada produksi dengan selalu mengedepankan inovasi dan inovasi. Lembaga-lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan pemerintah

harus dipersiapkan untuk usaha ini. Kebiasaan meninabobokkan rakyat dengan barang impor harus dihentikan.

Reorientasi dari Ethno-nation ke Nation-State

Pada bagian terdahulu telah dijelaskan bahwa pada awal abad XX telah terjadi evolusi semangat *ethno-nation* ke *nation-state* sehingga berpuncak pada kesepakatan untuk menjadi satu bangsa dengan Sumpah Pemuda 1928 dan terealisasi pada tahun 1945. Faktor pengikat rasa kebangsaan pada waktu itu antara lain tujuan yang sama yaitu ingin merdeka secara politik, makmur secara ekonomi, bermartabat secara kultural sebagaimana yang sering kali diungkapkan oleh Bung Karno. Selain itu, perasaan senasib sebagai bangsa yang sedang dijajah Belanda dalam lingkungan Hindia Belanda juga merupakan salah satu pendorong berkembangnya perasaan sebagai sebuah *nation*. Dalam hal ini, semua elemen dalam masyarakat mengharapkan organisasi dan tokoh pergerakan nasional untuk mewujudkan tujuan dan harapan mereka sebagai komunitas bangsa. Tujuan-tujuan dan harapan-harapan itulah yang merajut berbagai kelompok etnik menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia.

Apa yang menjadi persoalan sekarang adalah bahwa pada saat ini ketika dicanangkan Kebangkitan Nasional II dan 100 tahun Kebangkitan Nasional dan sebagainya justru terdapat arus balik perkembangan nasionalisme. Melihat gejala-gejala yang selama satu dekade terakhir ini jelas terlihat adanya proses evolusi dari *nation-state* menuju ke *ethno-nation*. Negara kebangsaan ini mulai terancam untuk terfragmentasi ke dalam negara etnik. Proses ini telah terjadi di banyak tempat seperti bekas wilayah Uni Soviet, Yugoslavia, dan sebagainya.

Oleh karena faktor protagonis kebangsaan Indonesia terutama bersumber dari tujuan, cita-cita, dan nasib (sejarah) yang sama, maka jika saat ini terjadi proses yang sebaliknya berarti perlu dilihat kembali efektivitas faktor-faktor protagonis itu. Pertanyaan dapat diajukan mengapa tujuan, cita-cita, dan persamaan nasib tidak lagi mampu mengikat keindonesiaan? Apakah hal itu disebabkan oleh cara berpikir masyarakat Indonesia yang berubah? Ataukah justru tujuan, cita-cita, dan perasaan senasib yang berubah?

Dalam hal perasaan senasib misalnya, banyak orang merasa bahwa sekarang ini nasib orang-orang/ pejabat di Jakarta berbeda dari nasib orang-orang di Aceh, Maluku, dan Papua. Banyak orang melihat Jakarta lebih memiliki nasib yang baik daripada di daerah-daerah di Luar Jawa. Dengan demikian tentu hal itu dapat dipandang sebagai pengkhianatan terhadap tujuan dan cita-cita masyarakat yang adil, makmur, dan merata. Dengan demikian, adalah tugas pemerintah untuk membangun integrasi ekonomi agar kesenjangan, baik secara vertikal (kaya-miskin) maupun horizontal (daerah makmur-daerah miskin) dapat dieliminasi. Upaya itu selanjutnya ditopang oleh integrasi politik dan budaya melalui pendidikan sejarah dan kewarganegaraan guna memberi pencerahan mengenai akar-akar historis dan kultural sebagai sebuah bangsa serta pengembangan komunikasi lintas budaya yang *fair* dan pengedepanan sikap toleransi. Dengan cara begitu, krisis kebanggaan sebagai bangsa Indonesia diharapkan dapat dibangun kembali.

Membuat Persamaan Nasib

Apa yang selama ini menjadi persoalan adalah bahwa fenomena resistensi daerah dan gerakan separatisme di berbagai daerah sering kali hanya dilihat dari perspektif 'pusat' yang dalam hal ini adalah pemerintah RI di Jakarta. Setiap bentuk resistensi dan separatisme dipandang sebagai manifestasi sikap tidak loyal dan pengingkaran terhadap 'konsensus luhur' dari para *founding fathers* yang telah merintis berdirinya negara RI. Logika kekuasaan pemerintah pusat sering kali didasari atas premis bahwa pepadaman terhadap setiap resistensi dan separatisme daerah merupakan sebuah misi untuk menegakkan 'konsensus luhur' menegakkan negara RI. Oleh sebab itu, setiap tindakan represif pemerintah pusat mendapatkan justifikasi dari premis berpikir seperti itu. Dalam melakukan represi, hampir tidak pernah terdengar bahwa pemerintah pusat melakukan mawas diri untuk menjawab pertanyaan mengapa resistensi dan gerakan separatisme itu terjadi.

Adalah sangat menarik untuk melihat pertentangan perspektif lokal dan nasional ataupun antara daerah dan pusat dalam kaitannya dengan persoalan bagaimana negara RI itu dipertahankan.

Pemerintah pusat tampaknya selalu menganggap bahwa proses-proses konsensus yang bermuara pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan sebuah konsensus final yang merupakan harga mati yang harus dipertahankan. Kesepakatan itu diyakini antara lain karena didorong oleh perasaan memiliki nasib yang sama sebagai masyarakat yang terjajah yang menginginkan sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi 1945. Dibayangkan pada waktu itu bahwa negara yang akan dibangun itu adalah negara yang mampu dan mau melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sudah menjadi semacam kontrak sosial. Tindakan represif pemerintah sering kali hanya didasarkan atas sebagian saja dari semangat itu, yaitu mempertahankan sampai titik darah penghabisan terhadap konsensus tahun 1945 itu, tanpa mau melihat apakah fungsi negara yang dicita-citakan itu sudah berjalan sesuai dengan konsensus dan harapan itu. Padahal dari perspektif daerah-daerah justru fungsi dan manfaat negara RI itu sendiri yang lebih penting, bukan kesepakatannya. Barangkali sering timbul pertanyaan apa untungnya ikut Indonesia jika harus dieksploitasi dan melarat. Bukankah tidak lebih baik untuk berdiri sendiri atau ikut bergabung negara lain yang lebih makmur dan adil? Jadi sudah waktunya bagi pemerintah pusat melakukan pendekatan kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan daripada pendekatan represif baik secara politik maupun militer.

Tampak ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang tidak semua tertangkap oleh para elite pemerintahan bahwa rasa 'keindonesiaan' dan nasionalisme tidak dapat lagi semata-mata dibangkitkan melalui romantisme sejarah, misalnya: dengan menyatakan bahwa 'kita merupakan sebuah bangsa yang memiliki nasib yang sama sebagai bangsa terjajah' sebagaimana yang dulu sering didengung-dengungkan oleh tokoh-tokoh nasionalis seperti Sukarno. Memang fenomena penjajahan itu pada umumnya dialami bersama oleh elemen bangsa Indonesia, meskipun tentu saja tidak semua kelompok sosial di kepulauan Indonesia pada waktu itu merasa dijajah. Apa yang lebih penting lagi adalah bahwa

perasaan senasib sebagai bangsa yang pernah dijajah itu dapat bersifat kontekstual. Barangkali dulu pada zamannya terutama pada generasi sebelum perang, perasaan keindonesiaan dapat ditumbuhkan hanya dengan romantisme sejarah semacam itu, namun pada saat ini ketika zaman telah berubah, generasi telah berganti maka romantisme sejarah itu tidak dapat lagi sepenuhnya digunakan untuk melanggengkan rasa keindonesiaan. Banyak aspek praksis yang justru menjadi pertimbangan penting, yaitu bagaimana negara RI yang pernah diperlakukan sebagai hasil konsensus luhur yang dibela bersama itu mampu memberikan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan kebanggaan kepada setiap warga negaranya. Keinginan itu merupakan hal yang sangat wajar. Sebagai bangsa yang pernah merasakan pahit dan getir penjajahan yang cukup lama mereka membayangkan bahwa negara Indonesia yang menggantikan negara kolonial itu mampu memberikan kemakmuran secara ekonomi, kemerdekaan secara politik, dan *dignity* serta kebanggaan secara kultural sebagaimana yang pernah dengung-dengungkan oleh Bung Karno dengan Triloginya

Pendekatan Sosial-Budaya

Problematika aktual lain yang selama dekade terakhir ini semakin menggejala adalah berkembangnya sentimen kedaerahan, isu tentang putra daerah, etnisitas, konflik agama, yang semuanya itu tampaknya juga merupakan antesenden bagi proses formasi keindonesiaan. Selama periode reformasi barangkali tidak terhitung jumlah kasus konflik mulai dari konflik antar kelompok sosial dan etnik serta agama hingga gejala pembersihan etnik. Sudah barang tentu secara deduktif orang dapat berdalih bahwa fenomena sosial seperti itu sulit terjadi jika keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran dapat dirasakan oleh masyarakat dan rasa keindonesiaan dimiliki oleh segenap elemen bangsa.

Dengan demikian, dapat digarisbawahi beberapa persoalan actual dan krusial yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia, antara lain bahwa berdirinya negara RI pada tahun 1945 sebagai suatu kesatuan politik yang formal belum sepenuhnya diikuti oleh proses formasi menjadi komunitas dan bangsa Indonesia sehingga rasa

keindonesiaanpun masih menjadi persoalan. Berbagai kejadian yang berupa konflik antaretnik, resistensi, dan gerakan separatisme menunjukkan bahwa rasa keindonesiaan (andai sudah ada) pada situasi tertentu dan/ atau untuk kepentingan tertentu masih dikorbankan demi kepentingan etnik, lokalitas, primordialisme, dan berbagai jenis kepentingan yang lain. Selain itu, dalam sepanjang sejarah Indonesia, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan disintegrasi sosial-budaya dan nasional lebih menekankan pada pendekatan keamanan dan politik. Pendekatan keamanan dan represi justru akan menyebabkan disintegrasi bangsa secara politik dan 'disindonesianisasi' secara sosial budaya. Dalam hal ini, sudah waktunya bagi pemerintah sekarang untuk lebih menekankan pendekatan kesejahteraan dan keadilan dalam menyelesaikan konflik dan ancaman disintegrasi dan gejala 'disindonesianisasi'.

Demikian pula penekanan secara politik dan militer serta indoktrinasi dalam menginternalisasikan perasaan keindonesiaan perlu diganti dengan pendekatan sosial budaya (MacIntyre 1994, 2-4). Dalam hal ini, pembelajaran sejarah di sekolah dan di berbagai lembaga pendidikan formal lainnya sangatlah penting. Persoalannya adalah materi pembelajaran sejarah seperti apa yang secara efektif mampu menumbuhkan kembangkan perasaan keindonesiaan, karena selama ini siswa-siswa di sekolah sudah mendapatkan pelajaran sejarah. Secara garis besar, materi pembelajaran sejarah untuk mengembangkan rasa keindonesiaan adalah materi yang menggambarkan '*process to be Indonesia*', sebuah proses panjang yang merupakan suatu *inevitably historical process* yang 'mengharuskan' berbagai kelompok sosial dan etnik menjadi bangsa Indonesia, bukan bangsa lain.

Dengan demikian '*process to be Indonesia*' bukanlah baru dimulai sejak zaman pergerakan nasional, apalagi dimulai sejak proklamasi 17 Agustus 1945. Narasi dan eksplanasi tentang '*process to be Indonesia*' perlu dimulai sejak zaman kuno hingga periode kekinian. Dekolonisasi 17 Agustus 1945 hanyalah merupakan salah satu tonggak terpenting saja dalam '*process to be Indonesia*' itu, yaitu berdirinya negara RI. Peristiwa itu hanyalah merupakan satu titik saja dari sebuah

evolutionary process dari sebuah proses yang namanya ‘*a process to be Indonesian*’ (sebagai komunitas dan bangsa). Tidak dapat dipungkiri memang kolonialisme sangat mewarnai ‘*process to be Indonesia*’ itu terutama ketika para kolonialis Barat mengapling-ngapling batas-batas fisik dan politik siapa yang akan menjadi *kawula* Hindia Belanda (lalu menjadi warga negara Indonesia), siapa yang menjadi *kawula* British Malaysia (lalu menjadi warga negara Malaysia), dan sebagainya. Namun demikian, sekali lagi peristiwa proklamasi kemerdekaan itu hanyalah merupakan sebagian kecil saja dari *long-term evolutionary process of being Indonesia*.

Oleh karena proses formasi keindonesiaan itu tidak hanya dimulai sejak tahun 1945 dan bahkan bukan sejak abad XX, namun sudah dimulai sebelum itu, maka pembangkitan semangat keindonesiaan melalui sejarah juga perlu ditampilkan melalui deskripsi dan eksplanasi sejarah yang panjang juga.

Simpulan

Apa yang disebut sebagai Nasionalisme Gelombang II di sini sebetulnya bukan merupakan konsep yang betul-betul baru. Konsep ini digunakan untuk lebih menekankan bahwa keinginan sukarela untuk hidup bersama sebagai sebuah bangsa sebagaimana yang dikemukakan oleh Ernest Renan ternyata belum cukup mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi Indonesia pada milenium ketiga ini. Konsep nasionalisme ala Renan memang cocok bagi Indonesia pada saat awal berdirinya, yaitu untuk mengatasi persoalan kesukuan dan *ethno state*. Namun demikian, ketika bangsa Indonesia ini berusia dewasa (sekarang sudah sekitar 78 tahun mencapai kemerdekaan) ternyata bangsa ini seharusnya mengambil pelajaran dari sejarahnya yang diwarnai oleh romantika dan dinamika konflik yang seolah-olah tidak berkesudahan (Hayes 1955, 181).

Nasionalisme Indonesia selama ini dapat dikatakan bersifat sentralistik dan otoriter, artinya para pemegang kekuasaan cenderung untuk ‘memaksakan’ perasaan nasionalisme ke segenap daerah ataupun ke seluruh kelompok etnik yang ada di wilayah Indonesia tanpa pandang bulu karena nasionalisme telah dimitoskan menjadi

sesuatu yang sangat sakral. Nasionalisme Indonesia ditempatkan sebagai warisan ‘perjanjian luhur’ di antara *founding fathers* Indonesia. Tindakan untuk mengingkari ‘perjanjian luhur’ itu akan dipandang sebagai pengingkaran terhadap nasionalisme Indonesia atau dapat dianggap sebagai resistensi dan bahkan apabila hal itu dilakukan oleh suatu daerah tertentu maka dapat dikategorikan sebagai pemberontakan dan akan mendapatkan represi dan kekerasan dari negara (pusat).

Beberapa dekade terakhir ini baik kondisi internal bangsa Indonesia maupun lingkungan strategis mengalami perubahan drastis. Perubahan internal antara lain mencakup wawasan masyarakat yang semakin luas yang menuntut standar internasional dalam hal kesejahteraan dan keadilan, pemahaman tentang hak asasi manusia, dan sebagainya. Selain itu, lingkungan strategis juga mengalami perkembangan misalnya terjadinya ekspansi regionalisme dan internasionalisme seperti yang sekarang sedang dihadapi yaitu mulai dilaksanakannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang juga harus bekerja sama dengan negara tetangga seperti Republik Rakyat Cina (Arase 2015, 25). Dengan demikian, Indonesia semakin tidak dapat menjadi negara yang eksklusif. Dalam situasi ini, Indonesia juga sulit menghindar dengan maraknya gerakan transnasional destruktif seperti terorisme dan radikalisme.

Apa yang menjadi persoalan adalah bahwa nasionalisme yang ‘*as usual*’ tidak akan cukup mampu untuk mengatasi persoalan-persoalan bangsa Indonesia yang sangat rumit sebagaimana yang dihadapi saat ini. Nasionalisme romantis yang hanya menekankan pada justifikasi masa lampau sudah tidak mencukupi untuk mempertahankan NKRI di masa depan. Di sinilah diperlukan Nasionalisme Gelombang II yang di samping menekankan pada komitmen kebangsaan dari semua elemen kepentingan, etnisitas, dan daerah, juga menekankan pada tanggungjawab negara bangsa yang direpresentasikan oleh pemerintah (pusat).

Sebagaimana telah disinggung di depan bahwa apa yang selama ini menjadi persoalan adalah bahwa fenomena resistensi daerah dan gerakan separatisme di berbagai daerah sering kali hanya dilihat dari perspektif ‘pusat’ yang dalam hal

ini adalah pemerintah RI di Jakarta. Setiap bentuk resistensi dan separatisme dipandang sebagai manifestasi sikap tidak loyal dan pengingkaran terhadap 'konsensus luhur' dari para *founding fathers* yang telah merintis berdirinya negara RI. Logika kekuasaan pemerintah pusat sering kali didasari atas premis bahwa pemadaman terhadap setiap resistensi dan separatisme daerah merupakan sebuah misi untuk menegakkan 'konsensus luhur', menegakkan negara RI. Jadi, setiap tindakan represif pemerintah pusat mendapatkan justifikasi dari premis berpikir seperti itu.

Adalah sangat menarik untuk melihat pertentangan perspektif lokal dan nasional ataupun antara daerah dan pusat dalam kaitannya dengan persoalan bagaimana negara RI itu dipertahankan. Pemerintah pusat tampaknya selalu menganggap bahwa proses-proses konsensus yang bermuara pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan sebuah konsensus final yang merupakan harga mati yang harus dipertahankan. Kesepakatan itu diyakini antara lain karena didorong oleh perasaan memiliki nasib yang sama sebagai masyarakat yang terjajah yang menginginkan sebuah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi 1945. Dibayangkan pada waktu itu bahwa negara yang akan dibangun itu adalah negara yang mampu dan mau melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah darah, menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu sudah menjadi semacam kontrak sosial. Tindakan represif pemerintah sering kali hanya didasarkan atas sebagian saja dari semangat itu, yaitu mempertahankan sampai titik darah penghabisan terhadap konsensus tahun 1945, tanpa mau melihat apakah fungsi negara yang dicita-citakan itu sudah berjalan sesuai dengan konsensus dan harapan itu atau belum. Padahal dari perspektif daerah-daerah justru fungsi dan manfaat negara RI itu sendiri yang lebih penting, bukan kesepakatannya. Barangkali sering timbul pertanyaan apa untungnya ikut Indonesia jika harus dieksploitasi dan melarat. Bukankah tidak lebih baik untuk berdiri sendiri atau ikut bergabung negara lain yang lebih makmur dan adil? Jadi sudah waktunya bagi pemerintah pusat melakukan

pendekatan kesejahteraan dan kemakmuran serta keadilan daripada pendekatan represif, baik secara politik maupun militer.

Tampak ada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang tidak semua tertangkap oleh para elite pemerintahan bahwa rasa 'keindonesiaan' dan nasionalisme tidak dapat lagi semata-mata dibangkitkan melalui romantisme sejarah, misalnya: dengan menyatakan bahwa 'kita merupakan sebuah bangsa yang memiliki nasib yang sama sebagai bangsa terjajah' sebagaimana yang dulu sering didengung-dengungkan oleh tokoh-tokoh nasionalis seperti Sukarno (Adams 1965). Memang fenomena penjajahan itu pada umumnya dialami bersama oleh elemen bangsa Indonesia, meskipun tentu saja tidak semua kelompok sosial di kepulauan Indonesia pada waktu itu merasa dijajah. Apa yang lebih penting lagi adalah bahwa perasaan senasib sebagai bangsa yang pernah dijajah itu bisa bersifat kontekstual. Barangkali dulu pada zamannya terutama pada generasi sebelum perang, perasaan keindonesiaan dapat ditumbuhkan hanya dengan romantisme sejarah semacam itu, namun pada saat ini ketika zaman telah berubah, generasi telah berganti, maka romantisme sejarah itu tidak dapat lagi sepenuhnya digunakan untuk melanggengkan rasa keindonesiaan. Banyak aspek praksis yang justru menjadi pertimbangan penting, yaitu bagaimana negara RI yang pernah diperlakukan sebagai hasil konsensus luhur yang dibela bersama itu mampu memberikan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, dan kebanggaan kepada setiap warga negaranya. Keinginan itu merupakan hal yang sangat wajar. Sebagai bangsa yang pernah merasakan pahit dan getir penjajahan yang cukup lama mereka membayangkan bahwa negara Indonesia yang menggantikan negara kolonial itu akan mampu memberikan kemakmuran secara ekonomi, kemerdekaan secara politik, dan *dignity* serta kebanggaan secara kultural sebagaimana yang pernah dengung-dengungkan oleh Bung Karno dengan Triloginya. Nasionalisme Gelombang II itulah yang sesungguhnya akan bisa mengatasi persoalan-persoalan Indonesia di masa yang akan datang.

Referensi

- Adams, Cindy. 1965. *Sukarno: An Autobiography*. Indianapolis, Bobbs-Merrill.
- Arase, David. 2015. "China's Two Silk Roads Initiative: What It Means for Southeast Asia." *Southeast Asian Affairs*, 25-45.
- Handelman, Howard. 2003. *The Challenge of Third World Development, 3rd Edition*. New Jersey: Prentice Hall, 2003.
- Hayes, Carlton J. 1955. *The Historical Evolution of Modern Nationalism*. New York: Macmillan.
- Henley, David. 1996. Nationalism and Regionalism in A Colonial Context: Minahasa in The Dutch East Indies. Leiden: KITLV Press.
- Hering, Bob. 2000. *Soekarno: Founding Father of Indonesia 1901-1945*. Leiden: KITLV Press.
- Houben, V.J.H. 2002. "Java in the 19th Century: Consolidation of a Territorial State." Dalam *The Emergence of a National Economy: An Economic History of Indonesia, 1800-2000*, diedit oleh Howard Dick. Leiden: KITLV Press.
- Kartodirdjo, Sartono. 1978. *Protest Movements in Rural Java*. Oxford, New York, Jakarta, Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Lindblad, J. Th. 1908. "The Outer Islands in the 19th Century: Contest for Periphery." Dalam *The Emergence*, diedit oleh Howard Dick, dkk. Leiden: Brill.
- Lindblad, J. Th. 1989. "De Opkomst van de Buitengewesten." Dalam *Het belang van de Buitengewesten: Economische Expansie en koloniale Staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlandsch-Indië*, diedit oleh A.H.P. Clemens & J. Th. Linblad. Amsterdam: NEHA.
- Lulofs, C. 1908. *Onze Politiek Tegenover de Buitenbezittingen*. Batavia: Van Dorp.
- MacIntyre, A.J. 1994. "Organising Interest: Corporatism in Indonesian Politics." Working Paper No. 43. Asia Research Center on Social, Political and Economic Change Murdoch University Western Australia.
- Noer, Deliar. 1982. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES.
- Prior, Paul A. dan Karen J. Lunsford. 2009. "History of Reflection, Theory, and Research on Writing." Dalam *Handbook of Research on Writing*, pp. 97-116. Routledge, 2009.
- Ricklefs, M.C. 1981. *A History of Modern Indonesia since Ca. 1300*. London: Macmillan.
- Tjokroaminoto, H.O.S. 1963. *Islam dan Sosialisme*. Jakarta: Endang dan Pemuda.
- Young, Kathleen McCarthy, dan Gaea Leinhardt. 1998. "Writing from Primary Documents: A Way of Knowing in History." *Written Communication* 15, no. 1: 25-68. <https://doi.org/10.1177/0741088398015001002>